



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

MENUJU KEMANDIRIAN BAHAN BAKU FARMASI MELALUI INVESTASI



G20 INDONESIA
2022 RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER

Peta Peluang Investasi
Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan

EDISI
04 - 2022

MENUJU KEMANDIRIAN BAHAN BAKU FARMASI MELALUI INVESTASI

Pada Triwulan II tahun 2022, industri farmasi (termasuk dalam klaster industri kimia) merupakan penyumbang kedua terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non-migas. Di tengah pandemi Covid-19, industri farmasi masih mampu tumbuh dibandingkan dengan industri non migas lain dengan tetap menunjukkan kinerja positif rata-rata 9,5% (BPS, 2022). Sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, industri farmasi berperan penting dalam lansekap industri di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan penetapan industri farmasi sebagai salah satu dari sepuluh industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

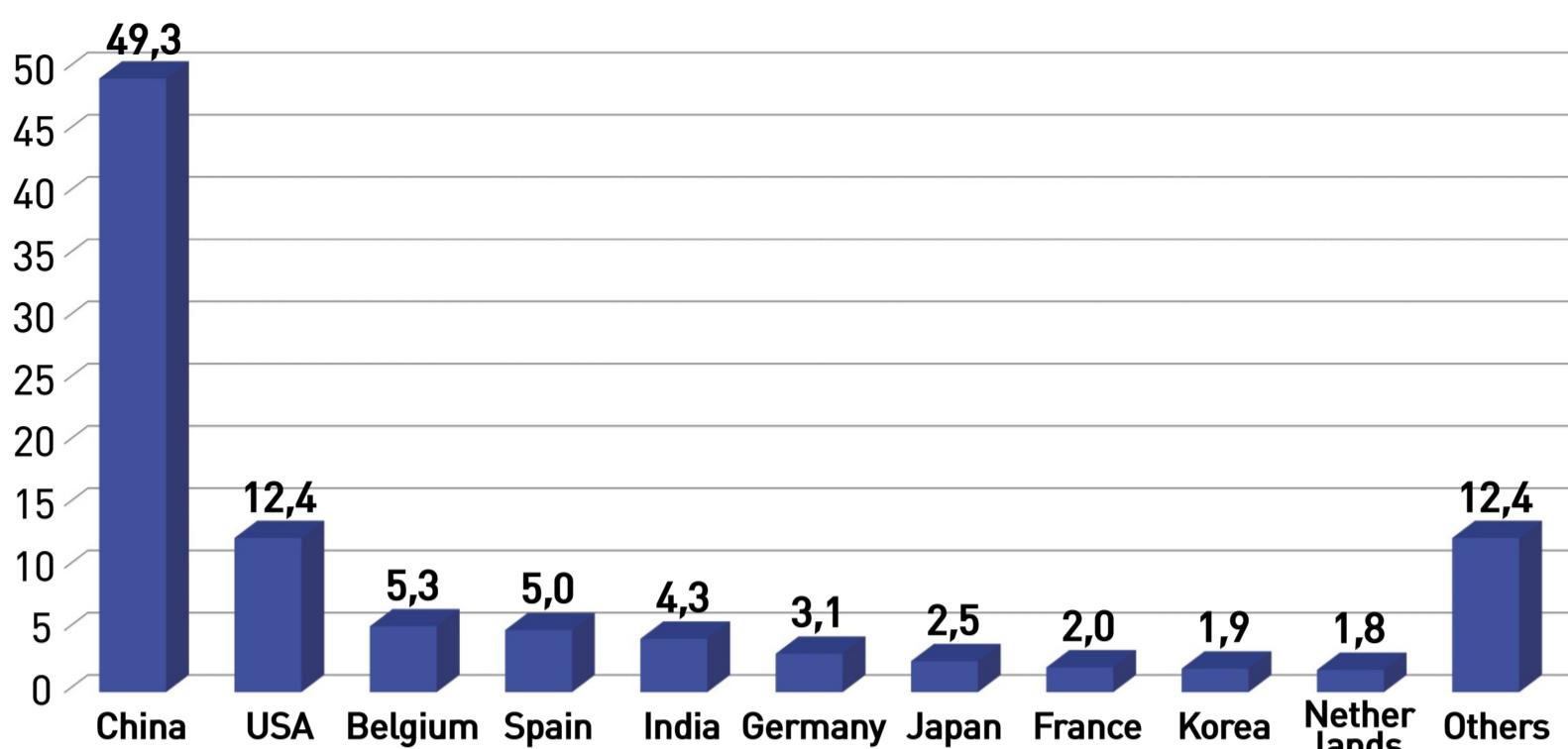
Dilihat dari aspek pasar, berdasarkan proyeksi IMS *Health*, industri farmasi nasional diproyeksikan termasuk dalam 15 besar kekuatan utama dunia dengan nilai pasar Rp 700 trilyun pada tahun 2025. Pasar farmasi Indonesia juga merupakan yang terbesar di ASEAN, kurang lebih 27% dari seluruh pasar farmasi ASEAN. Proyeksi kebutuhan pasar tersebut tentunya

mempertimbangkan beberapa hal: peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan dan perlunya obat-obatan, peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah sehingga meningkatkan daya beli mereka terhadap obat-obatan dan suplemen kesehatan, serta implementasi Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Namun demikian, dalam upaya mendorong pengembangan industri farmasi nasional, pemerintah masih menghadapi dinamika yang cukup kompleks. Permasalahan utama dalam industri ini adalah importasi bahan baku farmasi yang masih sangat tinggi. Meskipun saat ini industri dalam negeri sudah mampu memproduksi beberapa jenis bahan baku, namun mayoritas masih berproses di hilir, dan *in value* hanya 9% produk yang masih diimpor (*biotech* dan *patent*). Sedangkan untuk bahan baku obat 90% masih impor, berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan India (Kementerian Kesehatan, 2022).



Gambar 1. Proyeksi Pasar Farmasi Indonesia Tahun 2025

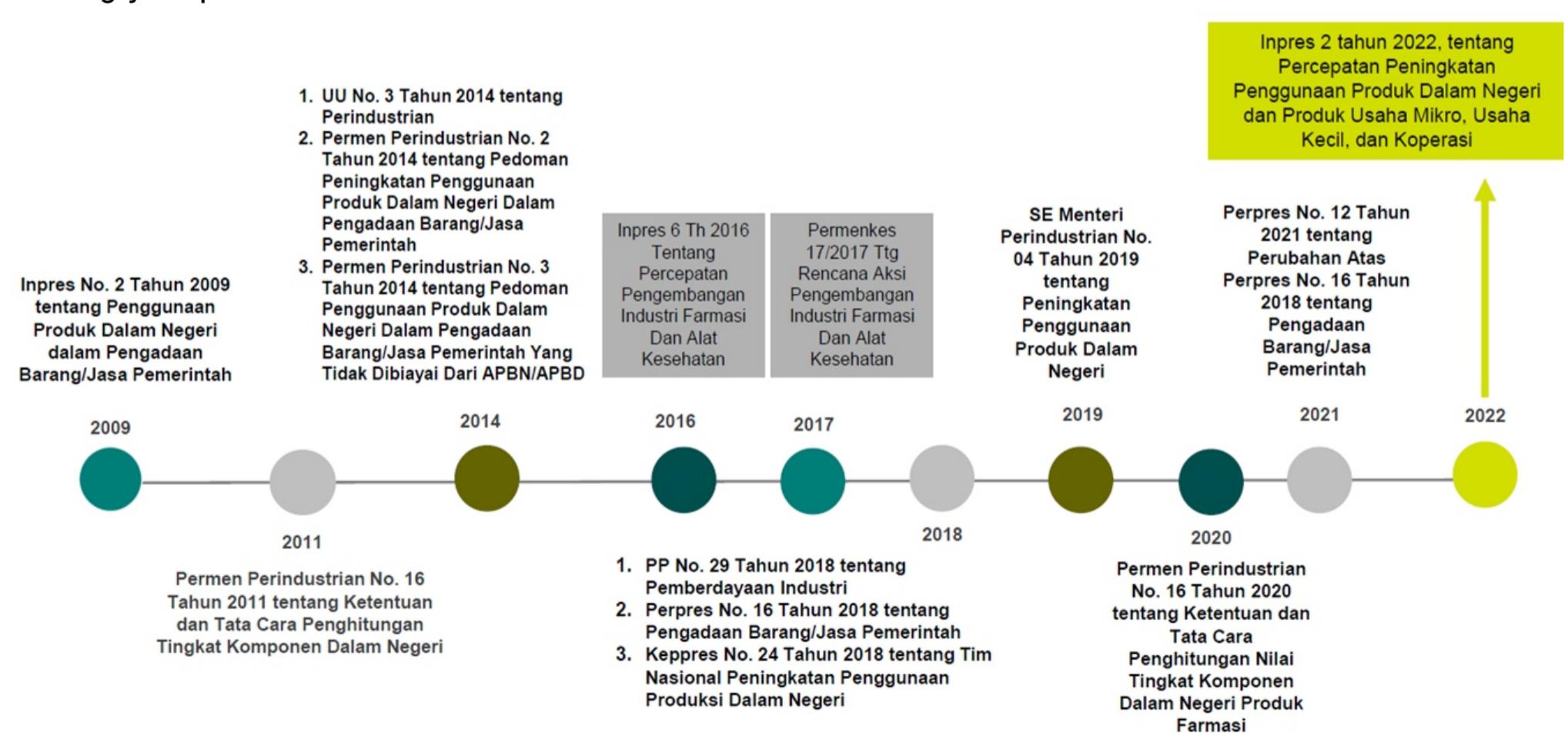


Gambar 2. Daftar Negara Eksportir Produk Farmasi ke Indonesia Tahun 2021

Kebijakan Percepatan Pengembangan Industri Bahan Baku Farmasi

Mempertimbangkan kendala utama yang ada dalam upaya mendorong percepatan pengembangan industri farmasi nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan pro-investasi. Terakhir, Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, dalam mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga meluncurkan program fasilitasi change source BBO produksi dalam negeri untuk mendukung industri farmasi formulasi untuk melakukan penggantian sumber bahan baku obat dengan produksi lokal. Melalui program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah produk obat dengan TKDN > 50 persen, yang menjadi prioritas dalam pengadaan khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah.

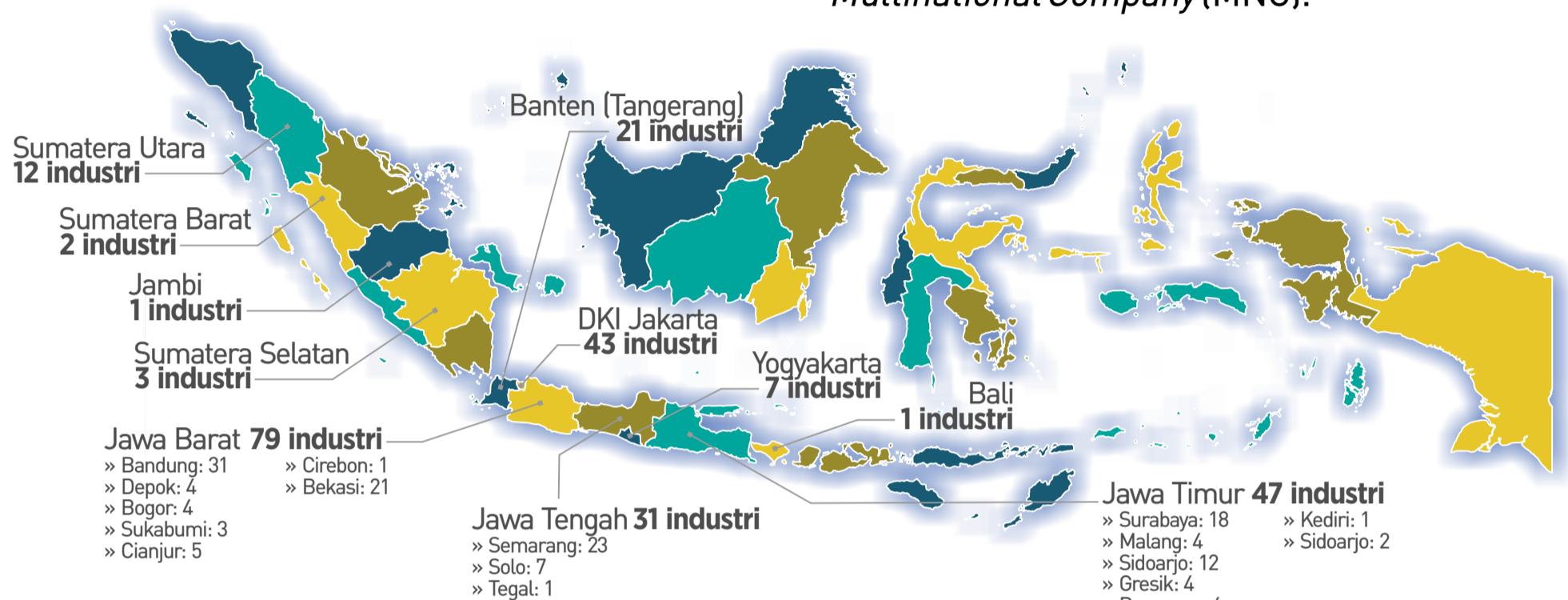


Gambar 3. Dukungan Regulasi Pengembangan Industri Farmasi Nasional Melalui Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sebaran Industri Farmasi di Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM, 2022) terdapat 247 fasilitas pabrik yang dimiliki oleh 223 industri farmasi di Indonesia.

Industri farmasi tersebut tersebar di wilayah barat Indonesia, terdiri dari 4 BUMN (PT.Kimia Farma Tbk; PT. Indofarma Tbk; PT. Biofarma Tbk; PT. Phapros Tbk), 195 industri swasta, 24 *Multinational Company*(MNC).



Gambar 4. Sebaran Industri Farmasi di Indonesia

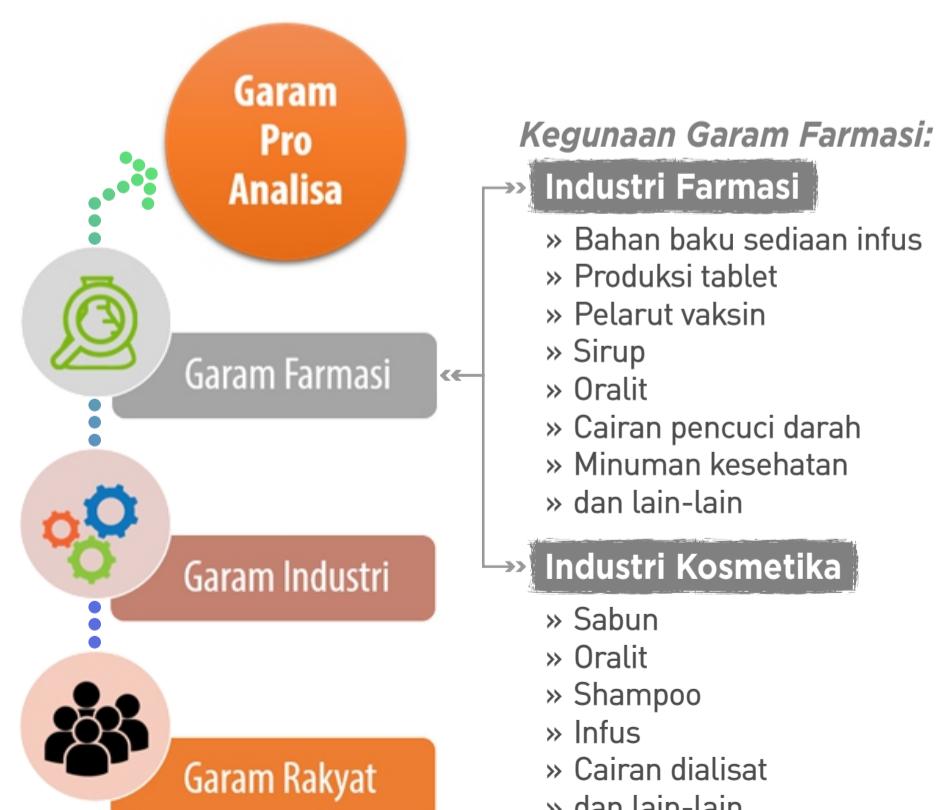
Mendorong Investasi Garam *Pharmaceutical Grade*

Secara umum, industri farmasi Indonesia masih impor, baik untuk BBO aktif atau *active pharmaceutical ingredients/API*, sekitar 851 jenis, maupun bahan pembantu (eksipien), sejumlah 441 bahan. Untuk biaya bahan baku (bahan aktif dan eksipien) menyumbang sekitar 25-30% dari seluruh biaya produksi obat yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya operasional, biaya marketing dan promosi, biaya distribusi serta biaya lain (administrasi). Dengan besarnya porsi impor bahan baku obat, maka tentunya sangat terpengaruh oleh kurs rupiah.

Salah satu bahan baku yang dibutuhkan dalam industri farmasi adalah Garam Farmasi, dapat berfungsi sebagai API maupun eksipien. Garam farmasi merupakan garam dengan kualitas tertinggi dengan kadar NaCl > 99,5 % serta dengan kandungan pengotor seperti Ca dan Mg < 50 ppm, sulfat < 150 ppm serta tidak adanya logam berat lainnya (Pusyantek BRIN, 2022).

| No | Parameter | Unit | Farmasi |
|----|---------------------------|---------|--------------|
| 1 | NaCl (adbk) | % | 99.0 – 100,5 |
| 2 | Mg dan logam alkali tanah | ppm | 100 |
| 3 | Sulfat | ppm | 200 |
| 4 | Keasaman | Mek/1kg | 1,25 |
| 5 | Kebasaan | Mek/1kg | 1,25 |
| 6 | Fe | ppm | 2 |
| 7 | As | ppm | 1 |
| 8 | Pb | ppm | 5 |
| 9 | Susut pengeringan | % | 0,5 |

Gambar 4. Tabel Parameter Garam Farmasi dan Pro Analisa



Gambar 5. Jenis-Jenis Garam Berdasarkan Tingkat Kualitas dan Fungsi Garam Farmasi

Berdasarkan data neraca garam (2021), kebutuhan garam farmasi nasional mencapai 6.501 ton. Kebutuhan tersebut masih belum dapat dicukupi oleh industri dalam negeri, karena 100% impor. Saat ini memang telah terdapat investasi industri garam farmasi yaitu PT Karya Daya Syafarmasi (KDS) di Kabupaten Bogor, namun kapasitas produksinya masih belum mencukupi kebutuhan nasional sekitar 74 ton/tahun, dengan harga Rp 75.500/kg. Dengan demikian, masih perlu peningkatan produksi garam farmasi di Indonesia.

Pengembangan investasi di sektor industri garam farmasi, khususnya berlokasi di Jawa Timur, yang mana mendekati bahan baku garam, diharapkan mampu mewujudkan kemandirian dan ketahanan industri farmasi nasional, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas garam dalam negeri. Yang menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana menjaga kualitas, harga, serta pengujian produk agar dapat bersaing dengan produk impor.



Kenapa Produksi Belum Cukup



Tidak semua pantai di Indonesia bisa dijadikan lahan garam.



Diperlukan musim kemarau yang panjang untuk memproduksi garam yang cukup.



Pembuatan dan pengolahan garam masih tradisional dan belum memanfaatkan teknologi.

Upaya Pemerintah

- Membuka lahan pembuatan garam seluas 5.270 hektar di Kupang, NTT, dengan kapasitas produksi 800.000 ton pada 2021.
- KKP akan membangun enam unit gudang baru di sejumlah sentra produksi garam tahun ini untuk menambah 18 gudang yang sudah ada .
- Harga eceran terendah garam konsumsi akan diatur untuk mencegah anjloknya harga yang dapat merugikan para petani.



DISCLAIMER

The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice. Additional information is available upon request.

For further information please contact:

Directorate of Investment Planning for Manufacturing Industry. Email: tu.ditpim@bkpm.go.id, Phone (021) 520 7022